BAB V

PENUTUP

A. Ikhtisar

Berkenaan dengan masalah perkawinan, khususnya jika dilihat dari sisi tata caranya, maka sebahagian masyarakat muslim Indonesia ada melakukan perkawinan yang diistilahkan dengan kawin kontrak. Pejabat pencatat nikah di Indonesia ini menolak untuk mencatatnya. Alasannya karena model perkawinan seperti itu haram dan tidak sah menurut hukum agama Islam.

Pada realitanya, kawin kontrak ini dibedakan kepada empat macam. Satu macam di antaranya dapat dikategorikan sebagai *nikah daim*, dan satu macamnya lagi dapat dikategorikan sebagai *nikah mut'ah*. Dalam hukum Islam yang merupakan acuan bagi tata cara pelaksanaan perkawinan orang yang beragama Islam, dikenal dua macam perkawinan yang sah (*syar'i*), yaitu *nikah daim* dan *nikah mut'ah*. Kendatipun terjadi perbedaan pendapat mengenai ada atau tidak adanya *nasakh* terhadap kehalalan *nikah mut'ah*, yang pasti bahwa jelas model nikah ini diakui sebagai *nikah syar'i* (sah menurut hukum agama Islam) oleh sebahagian umat Islam (termasuk oleh sebahagian umat Islam) di Indonesia.

Berkenaan dengan pandangan hukum nasional Indonesia mengenai kedudukan hukum kawin kontrak tersebut, tentu harus dilihat ketentuan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur hukum perkawinan itu sendiri. Kesepakatan nasional yang telah ada bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan sebagai aturan hukum tentang perkawinan di Indonesia. Ada beberapa prinsip dan azas perkawinan yang ditetapkan dalam hukum perkawinan nasional ini. Dua di antara prinsip perkawinan tersebut adalah pertama dari segi tujuan, bahwa setiap perkawinan diarahkan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Kedua dari segi ke-sahannya, bahwa yang menilai sahnya perkawinan diserahkan kepada aturan hukum agama dan kepercayaan dari mempelai (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).

Berdasar pada masalah seperti dikemukakan di atas, maka muncullah satu pertanyaan pokok, yaitu apakah penolakan pejabat pencatat nikah dengan alasan yang mereka kemukakan itu memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak ? Jika dipergunakan pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan, dengan atau melalui teori-teori silogisme, pluralisme hukum,

hirarki perundang-undangan, dan *asas lex specialis*, maka akan didapatkanlah kesimpulan seperti berikut ini.

B. Kesimpulan

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 telah disepakati dan ditetapkan sebagai aturan ataupun hukum tentang perkawinan nasional. Dalam undang-undang ini ditetapkan beberapa prinsip dan azas mengenai perkawinan. Satu di antaranya berkenaan dengan kesahan perkawinan. Prinsipnya melahirkan suatu konsep bahwa semua perkawinan yang sesuai hukum agama dan kepercayaannya adalah sah. Konsep ini kemudian melahirkan satu ketentuan hukum bahwa acuan yang harus dipakai untuk menilai sah tidak sahnya suatu perkawinan adalah hukum agama dan kepercayaan dari mempelai (suami-isteri itu). Jadi, orang Islam yang melaksanakan perkawinan telah sesuai dengan hukum Islam menurut mazhab yang mereka yakini adalah sah dan harus dinyatakan sah menurut hukum.
2. Perkawinan dalam bentuk kawin kontrak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terdiri dari empat (4) macam/model:
 - a. Perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka dengan tanpa adanya akad nikah. Perkawinan seperti ini lebih populer di masyarakat Indonesia dengan sebutan kumpul kebo, dan oleh Pemerintah Kabupaten setempat sebagai prostitusi.
 - b. Perkawinan dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana perkawinan biasa (*nikah daim*). Kelengkapan dari unsur-unsur syarat *munakahat* terpenuhi. Artinya ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan akad (*ijab kabul*). Akan tetapi wali nikahnya orang yang tidak berwenang dijadikan wali nikah. Sebab wali tersebut tidak ada hubungan nasabnya dengan mempelai wanita, juga bukan wali hakim. Wali hakim itu menurut hukum adalah yang diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA). Sementara mereka yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan itu bukan Kepala KUA, bahkan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - c. Perkawinan dilaksanakan dengan tata cara yang memenuhi semua unsur-unsur syarat *munakahat* dalam bentuk *nikah daim*. Namun sebelum upacara akad nikah (di luar akad), kedua mempelai membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis (lisan) tentang beberapa hal, di antaranya mengenai jangka waktu (jatuh tempo) perkawinan. Oleh

karena terpenuhi semua unsur-unsur syarat munakahat dalam bentuk *nikah daim*, maka perkawinan seperti ini dapat dikategorikan sebagai *nikah daim*.

- d. Perkawinan dilaksanakan dengan tata cara yang sesuai dan memenuhi unsur-unsur *nikah mut'ah*. Dalam tata cara perkawinannya, mahar dan jangka waktu yang disepakati disebut (diucapkan) dalam *shighat* akad nikah. Perkawinan model *nikah mut'ah* ini khususnya dilaksanakan oleh sebagian dari komunitas muslim syi'ah Indonesia.
3. Adapun status hukum dari kawin kontrak yang ada dan dilakukan oleh sebahagian masyarakat Indonesia ini ditinjau dari sisi aturan hukum nasional, terbagi kepada dua. Pertama; bahwa perkawinan itu tidak dapat dinilai sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah:
 - a. perkawinan yang hanya didasarkan atas suka sama suka tanpa dengan ikatan nikah.
 - b. perkawinan yang dilaksanakan seperti *nikah daim*, akan tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat munakahat untuk *nikah daim*. Kawin kontrak dalam model ini tidak sah menurut hukum negara, sebab tidak sah menurut hukum agama.Kedua; bahwa perkawinan tersebut dapat dinilai sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah a. perkawinan dengan model kawin kontrak dalam bentuk *nikah daim* yang rukun dan syarat munakahatnya terpenuhi, serta perjanjian atau kontraknya dilakukan di luar akad nikah (tidak diucapkan dalam shigat akad nikah). b. perkawinan dengan model kawin kontrak dalam bentuk *nikah mut'ah* yang memenuhi syarat menurut mazhab syi'ah imamiyah. Kedua macam perkawinan ini dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut aturan hukum nasional, sebab sah menurut hukum agama Islam sebagaimana kehendak pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. Jika pejabat pencatat nikah tetap melakukan penolakan terhadap kedua model kawin kontrak yang sah ini, solusinya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas penolakan tersebut. Upaya hukum seperti ini akan melahirkan yurisprudensi yang dapat mewujudkan kepastian hukum bagi kasus kawin kontrak tersebut, mengikuti jurisprudensi Mahkamah Agung tentang kawin beda agama.

C. Saran-saran

Dengan berpijak pada penemuan-penemuan yang ada dalam pembahasan disertasi ini, berkenaan dengan kawin kontrak; problema hukum dan solusinya, secara khusus berkenaan dengan pencatatannya, di sini diajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada para pejabat pencatat nikah, utamanya pejabat tertinggi sebagai pengambil kebijakan mengenai masalah pencatatan nikah di Kementerian Agama RI, kiranya dapat menerapkan ketentuan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan kehendak makna pasal tersebut. Yaitu dalam menerapkannya kepada peristiwa kawin kontrak, hendaknya memperhatikan serta tidak memosisikannya bertentangan dengan norma hukum yang dikehendaki oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia.
2. Kepada lembaga kekuasaan negara yang berwenang melakukan revisi terhadap undang-undang dan peraturan yang berada di bawahnya. Bahwa jika pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap dipertahankan, kiranya bernisiatif untuk memasukkan “jatuh tempo” menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan atau alasan perceraian menurut undang-undang. Dengan demikian, problema hukum yang terkandung dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 itu menjadi hilang.
3. Kepada para pelaku kawin kontrak yang berkeinginan perkawinannya resmi (tercatat), harus berani menjadi pahlawan kawin kontrak dengan melakukan gugatan ke Pengadilan atas penolakan melakukan pencatatan oleh pejabat pencatat nikah.